

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan Mempedomani RKPD tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n-1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, diawali dengan membuat SK Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah (terlampir) dengan menjabarkan Fungsi dari masing-masing Tim sesuai Tugas dan Fungsinya. Tim Penyusunan Renja ini terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan Sekretariat yang bertugas membuat dan menyusun Renja sesuai arahan dan rekomendasi dari Tim Penyusunan Renja.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dilakukan penyamaan persepsi teknis pada masing-masing Bidang dan UPTD sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam kegiatan awal penyusunan akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota dengan memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota yang telah diakumulasikan dalam usulan program/kegiatan yang ada pada masing-masing Kab/Kota. Terutama dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Sosial RI. Dengan mempertimbangkan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2022.

Untuk penetapan Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan sehingga Program/Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat diusulkan dalam RAPBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang nantinya Renja tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Agenda Kerja Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022

Agenda Penyusunan	Tahapan Penyusunan Renja (Bulan)							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pembentukan Tim Renja dan Pengumpulan data dan Informasi								
Rancangan Awal Renja dan Orientasi Renja								
Rapat dengan Kab/Kota								
Penyempurnaan Renja								
Verifikasi Renja								
Rancangan Akhir								
Penyempurnaan dan Penetapan Renja Perangkat Daerah								

1.2 Landasan Hukum

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
8. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daeah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tanggal 5 Februari 2018.

18. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga.
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
24. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/2613/II/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.
25. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 954/161/SK/APBD/DINSOS/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Penetapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
26. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 954/57/SK/APBD/Dinsos/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
 - b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

c. Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5. BAB V PENUTUP

LAMPIRAN TABEL

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2020 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp 71.099.265.302,- dipergunakan untuk membiayai 14 program dan 71 jenis kegiatan. Secara pencapaian target dan realisasi anggaran yaitu untuk keuangan sebesar 90,15% dan fisik sebesar 99,83%.

Dalam pencapaian terhadap hasil evaluasi LAKIP yang disusun telah sesuai dengan yang diharapkan dimana dalam target RPJMD hasil evaluasi LAKIP untuk Tahun 2020 Dinas Sosial mendapat hasil B dengan menyesuaikan terhadap capaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.

b. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Kinerja Renstra SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Realisasi terhadap program Kinerja Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 90,15 % dari pencapaian target Renja di tahun 2020. Pencapaian tersebut dapat di lihat dalam lampiran tabel berikut : (dapat di lihat pada http://simonevdokrenda.sumbarprov.go.id/2020/evaluasirenja?periode=2020&pilih_triwulan=4&data_renja=perubahan)

URUSAN PENUNJANG

No.	Program	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi	Predikat Kinerja
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	5,329,893,174	5,288,854,072	99.23% (ST)
2	Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	2,662,319,117	4,497,264,192	168.92% (ST)
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	192,000,000	160,306,650	83.49% (T)
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,132,400	10,112,400	99.80% (ST)
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	958,793,051	950,860,695	99.17% (ST)
Total Kegiatan		9,153,137,742	10,907,398,009	119.17% (ST)

URUSAN SOSIAL

No	Program	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi	Predikat Kinerja
1	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	0	0	nan% (SR)
2	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3,160,000	3,160,000	100.00% (ST)
3	Pembinaan Anak Terlantar	8,076,055,000	7,763,904,539	96.13% (ST)
4	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3,349,048,946	3,195,202,060	95.41% (ST)
5	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	3,433,988,156	3,228,838,881	94.03% (ST)
6	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	1,001,422,256	1,057,386,906	105.59% (ST)
7	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3,150,271,500	150,271,500	4.77% (SR)
8	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37,502,794,900	32,516,129,652	86.70% (T)
9	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	187,619,154	264,129,160	140.78% (ST)
10	Pemberdayaan Fakir Miskin	5,163,245,648	5,190,399,400	100.53% (ST)

- b. Belum tercapainya program/kegiatan di tahun 2020 karena adanya Refocusing kegiatan akibat dampak Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

c. Kaitan Target Renstra Dinas Sosial dengan Capaian Realisasi Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Target Renstra Tahun 2020 sudah dilakukan pencapaian hasil secara maksimal. Ada pencapaian yang kurang maksimal tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang tidak berjalan secara maksimal terkait Refocusing Anggaran terdampak Covid-19 di tahun 2020 tersebut. Pencapaian target sasaran terutama bagi pencapaian target SPM sudah dilakukan secara maksimal.

Dapat di lihat dalam lampiran pada tabel T-C.29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

Untuk bidang sosial standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana skala Provinsi

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Target kinerja dan analisa kebutuhan berdasarkan SPM bidang sosial tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	VARIABEL SPM	INDIKATOR SPM	TARGET SPM	DATA SASARAN SPM		ANGGARAN PER SATUAN SASARAN (Rp.)	ANALISA KEBUTUHAN (Rp.)
				SASARAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
	BIDANG SOSIAL						
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;	Makanan	100% Tiap Tahun	2 Panti Pemerintah (150 orangx365 hari)	54.750	35.000	1.916.250.000
				Panti Swasta (300 org x 365 hari)	109.500	35.000	3.832.500.000
		Sandang		PD. Netra (Panti Pemerintah)	50	1.715.237	147.218.792
				PD. Intelektual (Panti Pemerintah)	100	1.567.200	156.720.000
				Panti Swasta	300	1.715.237	514.571.100
		Asrama yang mudah diakses		Pembangunan Selasar pada Panti Pemerintah (PD. Netra)	1	248.612.000	248.612.000
				Dukungan Sarana dan Prasarana untuk Panti Milik Masyarakat	13	150.000.000	1.950.000.000
		alat bantu		Panti Pemerintah (PD. Netra)	50	174.300	8.715.000
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti untuk Milik Masyarakat	300	2.500.000	750.000.000
		perbekalan kesehatan		PD. Netra	50	102.157	5.107.827
				PD. Intelektual	100	115.683	11.568.310
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti untuk Milik Masyarakat	300	20.000.000	6.000.000.000
		bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial. .		Instruktur Bimbingan Fisik	2	4.800.000	9.600.000
				Instruktur Bimbingan Sosial	2	16.800.000	33.600.000
				Instruktur Bimbingan Mental Spiritual	3	4.800.000	14.400.000
				Peralatan Bimbingan Fisik (olahraga)	100	22.128	2.212.800
				Peralatan Bimbingan Sosial (ADL)	100	9.380	937.950
				Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	312	1.500.000	468.000.000
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti Swasta	300	1.696.219	508.865.700
		bimbingan keterampilan hidup sehari-hari		Penyandang Disabilitas Netra dan Pembelian Toolkit Kelayan	50	9.261.532	463.076.600
				Instruktur Keterampilan hidup sehari-hari	3	16.800.000	50.400.000
				Peralatan Bimbingan Keterampilan hidup sehari-hari	100	255.137	25.513.675
				Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	312	1.500.000	468.000.000
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti Swasta	300	1.696.219	508.865.700

		pembuatan nomor induk kependudukan		Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	26	150.000	3.900.000
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti Swasta	300	50.000	15.000.000
		akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Instruktur/ pengajar	26	8.263.846	214.860.000
				Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	26	150.000	3.900.000
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti Swasta	300	50.000	15.000.000
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Pekerja Sosial Profesional	26	150.000	3.900.000
		pelayanan penelusuran keluarga pelayanan reunifikasi keluarga		Seleksi dan Motivasi Kelayan	40	630.000	25.200.000
				Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	26	150.000	3.900.000
				Penyandang Disabilitas di Dalam Panti Swasta	300	50.000	15.000.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti sosial	Pengasuhan	100% Tiap Tahun	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	6.160	200.000	1.232.000.000
				Anak Asuh (PSAA Tri Murni)	10	2.400.000	24.000.000
		Permakanan		Anak Terlantar di Dalam Panti Swasta (4464 org x 365 hari)	1.629.360	35.000	57.027.600.000
				Anak Putus Sekolah pada Panti Pemerintah (PSAABR Budi Utama : 80 Org x 305 hari)	24.400	35.000	854.000.000
				Anak Sekolah Yatim,Piatu,Yatim Piatu dan Kurang Mampu (PSAABR Budi Utama :75 orang x 365 hari)	27.375	35.000	958.125.000
				Anak Terlantar pada Panti Pemerintah (PSBR Harapan : 100 org x 365 hari)	36.500	35.000	1.277.500.000
				Anak Asuh pada Panti Pemerintah (PSAA Tri Murni :100 org x 365 hari)	36.500	35.000	1.277.500.000
		Sandang		Anak Terlantar di Dalam Panti Swasta	4.464	1.715.237	7.656.817.968
				Anak Putus Sekolah, anak usia sekolah Yatim,Piatu,Yatim Piatu dan Kurang mampu pada Panti Pemerintah	155	2.516.987	390.133.000
				Anak terlantar pada Panti Pemerintah	200	1.715.237	343.047.400

		Anak Asuh pada Panti Pemerintah	100	1.308.652	130.865.200
	Asrama yang mudah diakses	Dukungan Saranan dan Prasarana untuk Panti Milik Masyarakat	74	150.000.000	11.100.000.000
		Anak terlantar pada Panti Pemerintah	7	85.000.000	595.000.000
	Perbekalan kesehatan	Panti Swasta Anak Terlantar	110	15.000.000	1.650.000.000
		Anak Putus Sekolah, anak usia sekolah Yatim,Piatu,Yatim Piatu dan Kurang mampu	155	120.000	18.600.000
		Anak terlantar pada Panti Pemerintah	200	25.000	5.000.000
		Anak Asuh pada Panti Pemerintah	100	126.600	12.660.000
	Bimbingan fisik, mental, spiriual, dan sosial	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	18.480	1.500.000	27.720.000.000
		Anak Terlantar di Dalam Panti Swasta	4.464	1.696.219	7.571.921.616
		Anak Putus Sekolah pada Panti Pemerintah	80	7.883.544	630.683.500
		Anak terlantar pada Panti Pemerintah	200	3.774.400	754.880.000
		Anak Asuh pada Panti Pemerintah	100	4.000.718	673.754.700
	Bimbingan keterampilan hidup sehari hari	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	18.480	1.500.000	27.720.000.000
		Anak Terlantar di Dalam Panti Swasta	4.464	1.696.219	7.571.921.616
		Anak usia sekolah Yatim,Piatu,Yatim Piatu dan Kurang mampu pada Panti Pemerintah	75	7.329.860	549.739.500
		Anak terlantar pada Panti Pemerintah	200	875.000	175.000.000
	Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	220	150.000	33.000.000
		Anak Terlantar di Dalam Panti Swasta	4.464	50.000	223.200.000
	Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	220	150.000	33.000.000
		Anak Terlantar di Dalam Panti Swasta	4.464	7.648.400	34.142.457.600
		Anak Asuh	100	2.496.830	249.683.000

		Pelayanan penelusuran keluarga		Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	220	150.000	33.000.000
				Anak usia sekolah Yatim,Piatu,Yatim Piatu dan Kurang mampu	20	1.140.000	22.800.000
				Anak terlantar pada Pantu Pemerintah	40	500.000	20.000.000
				Anak Asuh & Calon Anak Asuh pada Pantu Pemerintah	100	409.861	40.986.100
		Pelayanan reunifikasi keluarga		Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	4.400	150.000	660.000.000
				Anak Terlantar di Dalam Pantu Swasta	4.464	50.000	223.200.000
				Anak terlantar pada Pantu Pemerintah	200	50.000	10.000.000
		akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti		Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	50	150.000	7.500.000
				Anak Terlantar di Dalam Pantu Swasta	50	50.000	2.500.000
				Pengasuh pada Pantu Pemerintah	12	2.400.000	28.800.000
				Anak terlantar pada Pantu Pemerintah	144	200.000	28.800.000
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Pantu Sosial	Permakanan	100% Tiap Tahun	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu Swasta (70 org x 365 hari)	25.550	35.000	894.250.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu (PSTW KSI) 70 org x 365 hari	25.550	35.000	894.250.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu (PSTW SNA) 110 org x 365 hari	40.150	35.000	1.405.250.000
		Sandang		Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu Swasta	70	1.715.237	120.066.590
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu (PSTW KSI)	70	1.186.031	83.022.140
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu (PSTW SNA)	110	1.715.237	188.676.070
		Asrama yang mudah di akses		Dukungan Saranan dan Prasarana untuk Pantu Milik Masyarakat	2	150.000.000	300.000.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu (PSTW KSI)	9	150.000.000	1.350.000.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantu (PSTW SNA)	13	200.000.000	2.600.000.000

Alat bantu	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	70	2.500.000	175.000.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	11	2.500.000	27.500.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	30	2.500.000	75.000.000
Perbekalan kesehatan	Panti Swasta Lanjut Usia	2	20.000.000	40.000.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	70	1.000.000	70.000.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	110	1.500.000	165.000.000
Bimbingan fisik mental spiritual, dan sosial	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	24	1.500.000	36.000.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	70	1.696.219	118.735.330
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	70	3.177.219	222.405.330
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	110	2.000.000	220.000.000
Bimbingan keterampilan hidup sehari hari	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	24	1.500.000	36.000.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	70	1.696.219	118.735.330
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	1	5.957.500	5.957.500
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	1	5.279.760	5.279.760
Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	2	150.000	300.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	70	50.000	3.500.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	10	200.000	2.000.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	30	200.000	6.000.000
Akses layanan kesehatan dasar	Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	2	150.000	300.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	70	50.000	3.500.000
	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	30	190.000	5.700.000

				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	30	200.000	6.000.000
		Pelayanan penelusuran keluarga		Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	24	150.000	3.600.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	70	75.000	5.250.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	110	75.000	8.250.000
		Pelayanan reunifikasi keluarga		Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	70	150.000	10.500.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	70	50.000	3.500.000
				Pemulangan Luar Daerah Lanjut Usia Dalam Panti (PSTW KSI)	5	500.000	2.500.000
				Pemulangan Dalam Daerah Lanjut Usia Dalam Panti (PSTW KSI)	10	150.000	1.500.000
				Pemulangan Luar Daerah Lanjut Usia Dalam Panti (PSTW SNA)	5	500.000	2.500.000
				Pemulangan Dalam Daerah Lanjut Usia Dalam Panti (PSTW SNA))	10	150.000	1.500.000
		Pemulasaran		Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Swasta	15	1.500.000	22.500.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW KSI)	15	1.500.000	22.500.000
				Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSTW SNA)	20	1.500.000	30.000.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Permakanan	100% Tiap Tahun	Korban Bencana Alam dan Sosial	500	500.000	250.000.000
		Sandang		Korban Bencana Alam dan Sosial	500	500.000	250.000.000
		Tempat penampungan pengungsi		Korban Bencana Alam dan Sosial	500	300.000	150.000.000
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan dukungan psikososial		Korban Bencana Alam dan Sosial	100	500.000	50.000.000
				Tim penanggulangan bencana alam	100	2.500.000	250.000.000
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	penanganan khusus bagi kelompok rentan	100% Tiap Tahun	Bantuan layanan dukungan psikososial	20	15.000.000	300.000.000
		pelayanan dukungan psikososial		Tenaga pelopor perdamaian	30	2.500.000	75.000.000
				Petugas gudang logistik bencana sosial	30	2.500.000	75.000.000
				Tim pelaksana penanggulangan bencana sosial	30	2.500.000	75.000.000

7	Tenaga Kesejahteraan Sosial		100 % Tiap Tahun	TKSK	67	1.186.687	79.508.000
8	Pekerja Sosial Profesional		100 % Tiap Tahun	PSM	1.047	1.775.914	1.859.382.000
9	Penyuluh Sosial		100 % Tiap Tahun	Penyuluh Sosial	90	1.083.941	97.554.700
10	Relawan Sosial		100 % Tiap Tahun	-			
Total Analisa Kebutuhan							224.879.044.404

Dalam tabel diatas diharapkan pencapaian target sasaran bisa dilakukan secara maksimal dengan dukungan anggaran di Tahun 2022.

Untuk lebih terinci dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (Thn n-3)	Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n-1)	Tahun 2019 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn n+1)	Tahun 2016 (Thn n-3)	Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n1-)	Tahun 2019 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	11	12	13
A	Anak Terlantar													
	1 Pelatihan dan Keterampilan Anak Terlantar Putra dalam Panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	
	2 Pelatihan dan Keterampilan Anak Terlantar Putri dalam Panti (PSBR Harapan Padang Panjang)	80%	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	210 org	210 org	210 org	210 org	
	3 Pengurus panti sosial swasta		120 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	
	4 Pendamping anak terlantar		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	55 org	55 org	55 org	55 org	
B	Lanjut Usia Terlantar													
	1 Pelayanan dan Pemberian Keterampilan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti (PSTW Sabai Nan Aluih dan PSTW Kasih Sayang Ibu)	60%	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	
	2 Pendamping sosial lanjut usia		33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	
C	Penyandang Cacat													
	1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penyandang Cacat dan Eks Trauma Dalam Panti (PSBN Tuah Sakato)	60%	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	
	2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dalam panti (PSBG Harapan Ibu)	60%	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	
	3 Pendamping sosial penyandang cacat berat	60%	22 org	22 org	22 org	25 org	25 org	25 org	22 org	25 org	25 org	25 org	25 org	
	4 Rujukan bagi penyandang Eks Psikotik		27 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	27 org	25 org	25 org	25 org	25 org	
	5 Pelatihan penyandang cacat potensian		20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	25 ODK	25 ODK	25 ODK	25 ODK	

D	Penyanggah Penyakit Sosial													
1	Pelayanan, pendidikan dan keterampilan dalam panti (PSKW Andam Dewi Solok)	60%	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org							
2	Eks Korban NAPZA	60%	20 org	20 org	-	-	-	-	20 org	25 org	25 org	25 org	25 org	
3	Siswa / pelajar yang mendapatkan penyuluhan NARKOBA	60%	70 org	70 org	70 org	-	-	-	70 org	100 org	100 org	100 org	100 org	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	11	12	13
E	Anak Asuh												
1	Anak asuh putra dalam panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	75 org										
2	Anak asuh putri dalam panti (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	80%	100 org										
F	Keluarga Miskin												
1	Keluarga rentan yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	80%	525 KK	400 KK	440 KK	440 KK	440KK	440KK	400 KK	440 KK	440 KK	440 KK	440 KK
2	Panti Swasta Se Sumatera Barat	80%	4000 Anak										
3	Masyarakat terasing yang mendapatkan bimbingan keterampilan	80%	30 KK	30 KK	30 KK	30 KK	35 KK	35 KK	30 KK	35 KK	35 KK	35 KK	35 KK
4	Pekerja Migran Bermasalah	80%	69 org										
G	Bencana Alam												
1	Masyarakat yang tinggal dikawasan bencana	80%	-	50 org	55 org								
H	Kelembagaann Sosial												
1	FK Karang Taruna dan Pengurus		1 keg	8 keg	-	-	-	-	1 keg				
2	Pengelola WKSBM		40 org										
3	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial		24 PMKS										

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan penjabaran operasional dari RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 pada Prioritas 8 yaitu Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, telah melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Hubungan Sinergi		
		APBD	APBN	Kab/Kota
1	Program Pembinaan Anak Terlantar	360 org/tahun	240 anak	
2	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	150 org/tahun	360 orang	
3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	180 org/tahun dan 175 org/tahun	140 orang	
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	40 org/tahun	205 orang	
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	15.890 org/tahun	3910 KK	
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam	15 KK/tahun	280 orang	

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota. Untuk menentukan jumlah sasaran pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

2. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mulai dari Perencanaan sampai penganggaran belum maksimal.

Hambatan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan adalah :

1. Perubahan kewenangan yang membuat Perangkat Daerah harus menyesuaikan kembali Program/Kegiatan
2. Keterbatasan anggaran yang ada membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat dalam pencapaian target dan sasaran.
3. Kurangnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target dan sasaran sehingga tidak sinkronnya Program/Kegiatan yang ada di Provinsi dan Kab/Kota.

- c. Dampak program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah adalah: Sesuai dengan Prioritas 8 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu : **“Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal “** , berdasarkan data penanganan kesejahteraan sosial yang telah di berdayakan dari tahun 2016 s./ d 2020 adalah :

APBD

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Terlantar (dalam panti)	360/thn	360/thn	360/thn	360/thn	360/thn
2	Lanjut Usia Terlantar (dalam panti)	180/thn	180/thn	180/thn	180/thn	180/thn
3	Anak Asuh (dalam panti)	155/thn	155/thn	155/thn	175/thn	17 5/thn
4	Penyandang Cacat (dalam panti)	150/thn	150/thn	150/thn	150/thn	150/thn
5	Eks Penyandang Penyakit Sosial (dalam panti)	40/thn	40/thn	40/thn	40/thn	40/thn
6	Keluarga Miskin	415 org				
7	Anak Asuh Panti Swasta	5000 org	4668 org	4700 org	4850 org	5000 org
8	Bencana Alam	15 KK				
9	Keluarga Miskin/Rentan	410 KK	415 KK	415 KK	415 KK	410 KK

APBN

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemberdayaan FM	3800 KK	4600KK	1600KK	1200KK	1200 KK
2	Pemberdayaan Keluarga	260 KK	160 KK	160 KK	160 KK	265 KK
3	Pemberdayaan KAT	570 KK	50 KK	111 KK	50 KK	277 KK

5	Pemberdayaan PSM	62 PSM	55 PSM	50 PSM	179 TKSK	158 TKSK
6	Pemberdayaan Orsos	30 Orsos	44 Orsos	51 Orsos	45 LKS	9 Orsos
7	Pemberdayaan KT	62 KT	49 KT	54 KT	50 KT	65 KT
8	K2KS	4 TMP, 7 rumah	3 TMP, 10 rumah	2 TMP	2 TMP	3 TMP
9	Pelayanan dan Perlindungan Kesos Anak	200 org	640 org	280 org	280 org	108 org
10	Lanjut Usia	52 org	30 org	100 org	50 org	70 org
11	Penyandang Cacat	30 org	360 org	360 org	200 org	50 org
12	Anak Cacat	-	-	-	-	-
13	Pelayanan dan Perlindungan Eks Napza	30 org	45 org	45 org	45 org	100 org
14	Rehabilitasi Tuna Sosial	115 org	123 org	120 org	120 org	110 org
15	Bencana Alam	210 org	280 org	240 org	200 org	88 KK

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu didukung dengan beberapa Program / Kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan Beras untuk Panti swasta (Penyediaan Permakanan untuk Panti Swasta)
Pengadaan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras dan telah didistribusikan kepada 124 panti sosial di 19 kab/kota untuk 4.000 orang anak yang berada dalam panti swasta dan masing-masing anak mendapat 400 gr beras selama 150 hari.
- b. Penyediaan Sandang bagi Panti Swasta dan Pemerintah
Penyediaan Sandang bagi panti swasta diharapkan dapat berjalan lancar berkat adanya penerapan SPM pada perhitungan anggaran di Tahun 202.
- c. Penyediaan Logistik Bencana (Permakanan)
Ketersediaan logistik bencana yang masih kurang diharapkan dapat direalisasikan di Tahun 2022.
- d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negatif pada masyarakat, diantaranya adanya kecenderungan semakin meningkatkan kuantitas maupun kualitas PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Didasari bahwa hal ini merupakan tantangan kedepan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan

berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial semakin luas, serta mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Adapun peluang yang ada yaitu berupa :

1. Dukungan terhadap pelaksanaan SPM Urusan Sosial lingkup Provinsi
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Program pembangunan terhadap Fakir Miskin di Perkotaan dan Pedesaan
4. Program Penanggulangan Bencana.

Tantangan yang ada dapat berupa :

1. Konflik Sosial dalam masyarakat terhadap pencapaian Target dan Sasaran Kegiatan
2. Letak Geografis Kab/Kota

e. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-Isu Strategis yang dikumpulkan dari beberapa rapat berupa Hasil dari Forum Perangkat Daerah, Musrenbang dan Rekomendasi sebagai catatan strategis untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya anggaran untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Masih sedikitnya stok Logistik Bencana pada Dinas Sosial
- Pendataan terhadap Fakir Miskin yang belum dilakukan secara merata dan terpadu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rancangan ini diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan dalam bentuk Program/Kegiatan yang akan diusulkan.

Dalam proses penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan analisa kebutuhan terhadap masing-masing Bidang dan UPTD sehingga didapat usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan. Usulan yang diberikan oleh Bidang dan UPTD tersebut setelah dilakukan inventarisasi ditemukan kegiatan baru dan perubahan nomenklatur kegiatan.

Untuk Rancangan Awal RKPD akan diusulkan beberapa kegiatan baru untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah ada. Hal ini mengacu kepada kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90 tahun 2019.

Review terhadap rancangan dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari Masyarakat (Tabel T-C.32)

Penelaahan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancangan awal RKPD dan sudah termasuk dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga kegiatan yang ada di Kabupaten/Kota sudah terakumulasi dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Dalam usulan tersebut merupakan akomodir dari usulan program pengentasan kemiskinan seperti tercantum dalam tabel T.C32 seperti kegiatan :

Kesemua usulan kegiatan tersebut dilakukan terkait pelimpahan kewenangan yang ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Sesuai dengan Tugas dan Pokoknya Kementerian Sosial RI bersama instansi yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dinas Sosial sebagai OPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPJM sebagai berikut:

Program prioritas dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan adalah :

1. Pengendalian terpadu penanganan kemiskinan
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari
3. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Pemberdayaan Fakir Miskin
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
6. Pembinaan Anak Terlantar
7. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks.Trauma
8. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
9. Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal

Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud :

1. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam
2. Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam
3. Perluasan lapangan kerja
4. Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro

6. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya dikelompokkan ke dalam Pelayanan Dasar sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah lebih cepat tercapai. Adapun Program yang diberikan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- Pemberdayaan Sosial
- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penanganan Bencana
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan Tujuan dan Sasaran dalam Renja Tahun 2022 adalah :

Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah “**Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**”

Sasaran Kegiatan

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3. Meningkatnya PPKS yang memiliki Usaha
4. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RKPD tahun 2022 sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor –Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

“Sesuai dengan pengalihan kewenangan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka program/kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Tugas dan Pokok serta Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Uraian Tugas”.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 (Tabel T-C.33) terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian Kesejahteraan Sosial khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2022 (Dinas Sosial dan 8 UPTD) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
01.00 DINAS SOSIAL		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.800.000
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	54.800.000
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	200.904.259
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	249.921.200
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.239.700
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.801.677.221
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	655.165.100
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.607.892
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	53.330.100
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.06.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	38.700.000
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.000.000
1.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99.000.000
1.06.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.700.000
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	187.857.200
1.06.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.500.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.855.000
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.965.000
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.726.800
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.294.300
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.220.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.396.384
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	144.000.000
1.06.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	410.000.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.013.400
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.590.000
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.877.600

1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.079.717.282
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.171.000
1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.635.500
1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.800.000.000
1.06.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.900.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	57.379.800
1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	59.124.700
1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	649.884.650
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.063.911.585
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan	953.438.900
1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	93.257.100
1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	88.370.800
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan	8.800.163.800
1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	44.384.550
1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	56.579.600
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan	246.397.300
1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	40.194.000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI	51.061.000
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	881.343.500
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan	128.800.400
1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	375.626.000
1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	220.518.750
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	118.280.450
01.00 Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.920.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000

1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.042.400
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.361.500
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.677.200
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.350.229
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.876.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.990.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.053.600
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.380.000
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.821.100
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.600.000
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.960.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	1.356.585.100
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	153.215.000
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	12.660.000
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	686.254.700
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	40.986.100
01.00 Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.000.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.930.500
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.577.900
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.995.000
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.313.950
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.100.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.830.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.242.000
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.399.700
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.325.550
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.073.800
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.400.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	1.922.652.650
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	60.863.800
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	7.376.000
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	616.283.500
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	549.739.500

1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.512.800
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	28.800.000
01.00 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.060.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.250.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.181.500
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.900.000
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.960.000
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.486.100
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.215.686
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.483.500
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.206.500
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.990.000
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.367.000
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.944.750
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.750.000
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.300.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	1.345.837.000
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	283.401.850
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	3.911.430
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	702.629.676
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9.926.800
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	16.800.000
01.00 Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.970.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.250.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.868.191
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.020.000
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.260.000
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.565.600
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.184.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.581.000
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.06.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.266.325
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.936.300
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.318.800
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.920.000

1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.786.352
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.200.000
1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000
1.06.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.450.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan	578.163.256
1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang	101.280.000
1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	12.065.000
1.06.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	321.991.000
01.00 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.680.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.750.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.847.000
1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.115.000
1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.468.800
1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.377.400
1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.405.000
1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.973.500
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.150.000
1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.458.470
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000
1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.625.018
1.06.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.730.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan	968.735.100
1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang	83.021.073
1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.966.000
1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	187.559.380
1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan	15.400.000
01.00 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin	
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.320.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.535.700

1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.300.000
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.920.000
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.065.794
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.425.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.872.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.199.350
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.181.530
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.875.600
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.660.000
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.270.000
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.150.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.443.733.336
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	190.744.000
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	14.585.000
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	409.395.302
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	9.500.000
01.00 Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.960.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.250.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.870.800
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.993.000
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.233.500
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.026.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.260.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.785.000
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.970.000
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.339.800
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.669.850
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.420.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	1.374.213.025
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	163.090.379
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	10.070.950
1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	426.343.850
01.00 Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.030.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.250.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.037.500
	1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.476.000
	1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.375.300
	1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.889.000
	1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.075.000
	1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.279.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
	1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.864.500
	1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.199.580
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.897.500
	1.06.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.080.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
	1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan	704.165.600
	1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang	148.247.916
	1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	2.893.600
	1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	502.002.100

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang terukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja tahun 2022, diharapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2022, beberapa hal yang menjadi catatan penting :

1. Kondisi Sumatera Barat yang rawan bencana, untuk mengantisipasi perlu adanya kesiapsiagaan dari petugas dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat (emergency) bencana.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Berkaitan dengan hal tersebut kewenangan menurut SPM untuk Provinsi yaitu Rehabiltasi Sosial Dasar yang berada di dalam panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup Provinsi, sedangkan untuk Kab/Kota berada di luar panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup Kab/Kota. Perlu adanya penakanan untuk pelaksanaan SPM pada masing-masing Pemerintah Daerah.

Rencana Tindak Lanjut

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

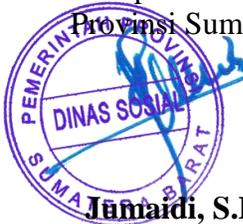
1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan
2. Penerapan SPM perlu di dukung oleh semua pihak guna meningkatkan taraf hidup masyarakat

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- b. Mempedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Padang, 10 Maret 2021
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



Junaidi, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670817 200003 1 006